

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal HCFC-22 ini dianalisa dari sudut pandang India sebagai negara sumber permintaan impor ilegal. Untuk menganalisa penyebab terjadinya perdagangan ilegal tersebut menggunakan teori *compliance* yang disampaikan oleh Ronald. B. Mitchell yang mana memaparkan mengenai keterkaitan antara kepatuhan, efektifitas, dan *incapacity*. Berdasarkan pemaparan pada Bab 2 dan Bab 3 terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

Pertama, terjadinya perdagangan ilegal HCFC-22 antara India dan Cina pada tahun 2013 dan 2014 dilihat dari sudut pandang India berada pada kuadran 3 hubungan antara kepatuhan dan efektifitas yaitu menunjukkan adanya hubungan *low compliance-low effectiveness*. Hal tersebut dikarenakan walaupun secara formal (administratif) tingkat kepatuhan India terhadap Protokol Montreal tinggi, namun aktor sub-negara yang dalam hal ini adalah pelaku impor ilegal melakukan pelanggaran terhadap peraturan *The ODS (Regulation and Control) Rules, 2000* dan kebijakan HPMP *stage 1* terutama terkait sistem lisensi. Selanjutnya *low effectiveness* terjadi karena perdagangan ilegal tersebut mengindikasikan jika pelaku impor masih belum dapat mengubah perilakunya untuk menggunakan bahan alternatif baru dan tetap bertahan menggunakan HCFC-22.

Selanjutnya kesimpulan kedua adalah terkait dengan penyebab terjadinya perdagangan ilegal HCFC-22 tersebut yang dianalisa dari sudut pandang negara India. Sebelumnya telah disampaikan pada kerangka pemikiran jika ada satu unsur sama-sama menjadi bagian penting bagi kepatuhan negara dan keefektifitasan suatu regulasi baik nasional maupun internasional. Unsur tersebut adalah *incapacity*.

Terkait dengan *incapacity*, perdagangan ilegal HCFC-22 tersebut terjadi karena adanya keterbatasan negara baik dari pemerintah India dan juga masyarakat India. Dari sisi pemerintah, *incapacity* yang terjadi merupakan keterbatasan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan teknologi terutama kebutuhan akan bahan alternatif HCFC-22. Hal tersebut sesuai dengan analisa Mitchell terkait dengan terjadinya *non-compliance* dan rendahnya efektivitas dikarenakan adanya permasalahan *incapacity*.

Terkait dengan hal tersebut, pada Bab 3 telah dipaparkan jika kebutuhan akan HCFC-22 di India pada tahun 2013 dan 2014 terus meningkat, namun pemerintah terus melakukan pembatasan konsumsi HCFC-22 dengan harapan pelaku usaha atau pihak yang membutuhkan HCFC-22 beralih menggunakan bahan alternatif baru pengganti HCFC-22. Namun, penekanan konsumsi HCFC-22 tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan bahan alternatif HCFC-22 dan teknologinya oleh pemerintah India pada tahun 2013 dan 2014. Hal tersebut dikarenakan pemerintah belum menemukan atau bahkan tidak menemukan bahan alternatif yang tepat untuk menggantikan penggunaan HCFC-22 sampai dengan tahun 2013. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan RAMA

yang menyatakan jika hingga tahun 2013 tidak ditemukan bahan pengganti untuk HCFC-22.

RAMA sendiri merupakan badan yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup India untuk melakukan survei terhadap penggunaan HCFC-22. RAMA membandingkan HCFC-22 dengan bahan-bahan kimia yang berpotensi menjadi bahan alternatif pengganti di India, dan hasilnya RAMA menyatakan jika tidak ada bahan pengganti yang tepat untuk menggantikan HCFC-22. Hal tersebut karena selain bahan alternatif pengganti seperti R410 dan R404A tidak memenuhi persyaratan *low* GWP karena nilai GWP yang lebih tinggi dari HCFC-22, bahan alternatif tersebut juga lebih mahal dibandingkan dengan HCFC-22. Sedangkan bahan alternatif lain seperti HFC-32 dan *natural refrigerant* masih diperdebatkan dalam isu keamanannya karena lebih mudah terbakar.

Maka dari itu sampai dengan tahun 2013, pemerintah India masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut termasuk teknologinya. Selain itu RAMA juga menyampaikan jika terdapat tantangan lain bagi pemerintah India terutama terkait perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan perusak ozon. Tantangan tersebut adalah tidak tersedianya teknologi untuk beralih pada alternatif baru pada semua perusahaan.

Kemudian *incapacity* juga ditemukan dari sudut pandang kondisi masyarakat India, yang mana kondisi masyarakat India sendiri masih terbatas, yaitu tidak dapat mengikuti kebijakan HPMP *stage* 1 sepenuhnya dikarenakan kapasitasnya terbatas. Dapat diketahui jika 94,6% pembelian AC di India pada tahun 2013 merupakan *non-inverter type* yaitu tipe AC lama yang biasanya masih

menggunakan HCFC-22. Sedangkan pembelian terhadap *inverter type* hanya sekitar 5,4 %. Hal tersebut dikarenakan masyarakat India hanya memilih untuk membeli AC tipe lama karena lebih murah karena pendapatan masyarakat India juga menghendaki masyarakatnya untuk membeli AC yang lebih murah. Selain itu, pembelian AC tersebut menjadi hal yang wajib mengingat kondisi suhu udara di India yang cukup ekstrim yang mana menjadikan masyarakatnya tidak dapat hidup tanpa AC.

4.2 Saran

Dari sisi akademis, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari topik penelitian, subjek dan objek penelitian, serta jangkauan penelitian ini yang terbatas pada fenomena perdagangan ilegal HCFC-22 antara India dan Cina pada tahun 2013 dan 2014 yang mana lebih banyak membahas permasalahan dari sudut pandang India. Selain itu dalam penelitian ini, penulis baru menyoroti dari sisi pemerintah dan masyarakat dan belum menyentuh sudut pandang dari kondisi pelaku bisnis. Sehingga, penulis berharap agar penelitian selanjutnya terkait fenomena ini dapat dilakukan secara lebih mendalam sehingga dapat memperkaya informasi, pengetahuan, dan strategi bagi pemangku kepentingan terkait untuk dapat menyelesaikan masalah serupa.

Sedangkan secara praktis, setelah melakukan penelitian dan mengetahui kesimpulan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran bagi Pemerintah terutama India. Pertama, dalam menentukan suatu kebijakan sebaiknya dilihat dari *bottom-up* daripada *up-bottom*. Maksudnya sebaiknya

pemerintah melakukan dan mengidentifikasi kapasitas dalam negerinya sebelum memutuskan kebijakan dan menyepakati suatu perjanjian lingkungan Internasional. Karena dalam kasus ini yang terjadi adalah *bottom up*, yaitu pemerintah India menyepakati terlebih dahulu Protokol Montreal sehingga mewajibkan India harus patuh terhadap regulasi Protokol Montreal, padahal berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan keterbatasan kemampuan dalam negerinya.